JTIK
Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi

JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)
p-ISSN : 2087-0868 (media cetak); e-ISSN : 2598-9707 (media online)
Vol. 16, No. 2, September 2025
http://ejurnal.provisi.ac.id/index.php/JTIKP

KOMUNIKASI ORGANISASI BAGIAN LEGISLASI DALAM PENGESAHAN RAPERDA DI SEKRETARIAT DPRD KOTA PALEMBANG: ANALISIS BERDASARKAN TEORI SISTEM UMUM DI SEKRETARIAT DPRD KOTA PALEMBANG

Meytha Cahya Putri[1], Muslimin Ritonga[2]
[1,2] Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Raden Fatah Palembang

Article Info

Article history:

Received June 6, 2025
Revised June 11, 2025
Accepted August 29, 2025

Keywords:

Draft Regional Regulation,
Organizational Communication,
Secretariat,
DPRD

ABSTRACT

Organizational communication plays an important role in the management and decision-making of an institution, including in legislative institutions such as the Regional People's Representative Council (DPRD). This study aims to analyze how organizational communication that takes place in the Palembang City DPRD Secretariat can influence the process of ratifying the Raperda. In addition, this study also aims to explore ways to improve the effectiveness of communication between parties involved in the legislative process. This study applies a qualitative approach with a descriptive research type. The results of the study indicate that effective communication between superiors and subordinates, between parallel sections, and between sections with different tasks plays an important role in facilitating the legislative process

Corresponding Author:

Meytha Cahya Putri,
Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Raden Fatah Palembang.
Email: 2110701006@radenfatah.ac.id

OPEN ACCESS

1. INTRODUCTION

Komunikasi merupakan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial. Melalui komunikasi, manusia berupaya memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Demikian pula, kehadiran organisasi bertujuan untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan individu yang tergabung di dalamnya. Dalam konteks ini, komunikasi organisasi memegang peran penting dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan di suatu institusi, termasuk dalam lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Evi Zahara, 2018).

Teori Sistem Umum membantu menganalisis bagaimana bagian legislasi DPRD Kota Palembang berinteraksi dengan berbagai unit lain, baik internal maupun eksternal, untuk mengesahkan RAPERDA. Ini memberikan fondasi konseptual yang kuat dalam menjelaskan hubungan antara komunikasi, koordinasi, serta keberhasilan pengesahan peraturan daerah. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya berkontribusi dalam

memperkaya studi komunikasi organisasi di lingkungan pemerintahan, tetapi juga menunjukkan orisinalitas dalam konteks lokal yang spesifik.

Salah satu tahapan penting dalam proses legislasi adalah pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yang membutuhkan kerja sama dan koordinasi dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal organisasi, seperti anggota dewan, Sekretariat DPRD, eksekutif, dan masyarakat (Febri Rahmanto, 2004). Di DPRD Kota Palembang, pengesahan Raperda, yang merupakan bagian utama dari tugas legislatif, membutuhkan arus komunikasi yang efektif, transparan, dan jelas di antara seluruh pihak terkait. Hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota dewan, antara dewan dengan sekretariat, serta antara DPRD dengan eksekutif dan masyarakat sangat dibutuhkan agar proses legislasi dapat berjalan dengan lancar. Dalam konteks ini, Sekretariat DPRD memegang peranan penting karena bertugas mendukung kelancaran aspek administratif, teknis, serta komunikasi dalam pengesahan Raperda (Octaleny, 2023).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai hambatan dalam komunikasi organisasi yang bisa memperlambat proses legislasi. Contohnya adalah terjadinya miskomunikasi antara anggota DPRD dengan Sekretariat DPRD terkait prosedur, substansi, atau jadwal pembahasan Raperda. Di samping itu, lemahnya koordinasi antara Sekretariat DPRD dengan eksekutif maupun pihak eksternal lainnya dapat berujung pada keterlambatan pengesahan Raperda atau timbulnya kesalahpahaman dalam penyusunan dan pembahasan draft Raperda (Azizah et al., 2021).

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana komunikasi organisasi yang berlangsung di Sekretariat DPRD Kota Palembang dapat memengaruhi proses pengesahan Raperda. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi cara-cara dalam meningkatkan efektivitas komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses legislasi. Melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan solusi yang mampu memperlancar arus komunikasi dalam struktur organisasi legislatif, sehingga tahapan legislasi dapat dilaksanakan secara lebih efisien, produktif, dan menghasilkan produk hukum yang tepat waktu serta berkualitas.

Organisasi terdiri dari individu-individu yang memiliki latar belakang, kepribadian, dan potensi yang berbeda-beda, sehingga diperlukan komunikasi yang efektif untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat memicu konflik internal. Interaksi antar anggota dalam suatu kelompok organisasi pada akhirnya akan membentuk ekspektasi-ekspektasi tertentu. Pemimpin yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik kerap dipersepsikan oleh bawahannya sebagai sosok yang mampu menjalankan peran kepemimpinannya secara efektif.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan institusi perwakilan tempat masyarakat menyampaikan aspirasi serta memperjuangkan kepentingannya. Melalui lembaga ini, lahir berbagai kebijakan yang menjadi pedoman bagi eksekutif dalam mengelola pemerintahan, baik dalam bentuk peraturan daerah, fungsi pengawasan, maupun pengelolaan anggaran (Supriadi, 2017; Hermayanti, 2015).

Sekretariat DPRD Kota Palembang memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan fungsi DPRD. Artinya, efektivitas komunikasi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD sangat menentukan sejauh mana fungsi DPRD dapat berjalan optimal. Oleh karena itu, untuk mencapai atau meningkatkan efektivitas kinerja DPRD, Sekretariat perlu memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas guna mendukung DPRD dalam menjalankan perannya sebagai representasi rakyat yang menyerap aspirasi masyarakat. Struktur organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas Sekretaris, Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Persidangan dan Risalah, serta Bagian Hukum dan Perundang-undangan (Riban & Yusuf, n.d.).

Dalam memahami dinamika komunikasi organisasi, khususnya di lingkungan pemerintahan, banyak penelitian sebelumnya yang telah mengkaji bagaimana interaksi antar bagian dalam organisasi berkontribusi terhadap pencapaian tujuan bersama. Penelitian oleh Luthans (2005) menekankan pentingnya komunikasi efektif dalam mempertahankan koordinasi lintas departemen. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Robbins

dan Coulter (2012) menunjukkan bahwa struktur organisasi yang kompleks membutuhkan mekanisme komunikasi yang adaptif untuk mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, penelitian oleh Effendy (2003) mengenai komunikasi birokrasi menunjukkan bahwa keterbukaan, kejelasan alur informasi, dan hubungan antar bagian menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan publik, termasuk dalam proses legislasi daerah. Penelitian lain oleh Ruliana (2014) menekankan bahwa interaksi antarsubsistem dalam organisasi pemerintahan mencerminkan pola komunikasi yang kompleks, yang bila dikelola dengan baik, dapat mempercepat proses legislasi dan pengambilan keputusan.

Teori Sistem Umum (Scott, 1961) sebagaimana dijelaskan oleh Pace dan Faules (2006) sangat relevan untuk memahami penelitian ini. Organisasi dilihat sebagai sistem kompleks yang terdiri dari berbagai subsistem—produksi, batasan, adaptasi, dan manajemen—yang saling bergantung dan berinteraksi satu sama lain. Komunikasi menjadi proses kunci yang menghubungkan semua subsistem tersebut. Konsep ini diperkuat oleh pendapat Ami (2019) yang menyatakan bahwa fungsi koordinasi dalam organisasi memerlukan komunikasi yang intensif dan efektif antar bagian.

Dalam penelitian ini, penerapan Teori Sistem Umum membantu menganalisis bagaimana bagian legislasi DPRD Kota Palembang berinteraksi dengan berbagai unit lain, baik internal maupun eksternal, untuk mengesahkan RAPERDA. Ini memberikan fondasi konseptual yang kuat dalam menjelaskan hubungan antara komunikasi, koordinasi, serta keberhasilan pengesahan peraturan daerah. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya berkontribusi dalam memperkaya studi komunikasi organisasi di lingkungan pemerintahan, tetapi juga menunjukkan orisinalitas dalam konteks lokal yang spesifik.

2. METHOD

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini anggota DPRD Kota Palembang dalam forum rapat yang membahas laporan Panitia Khusus Kriteria pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan fokus penelitian.

Informan utama dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Bagian Legislasi, karena memiliki tanggung jawab sentral dalam koordinasi legislasi dan menjadi simpul komunikasi antara tim teknis legislasi dan pimpinan DPRD.
2. Staf legislatif, yang dilibatkan sebagai informan pendukung untuk memberikan perspektif teknis dan administratif dalam proses pengesahan Raperda.

Penambahan informan dilakukan secara *snowball*, yaitu berdasarkan rekomendasi dari informan awal yang dianggap mengetahui informasi relevan lainnya.. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya untuk menggali makna di balik tindakan komunikasi yang dilakukan, menelusuri latar belakang sosial dan politik yang memengaruhinya, serta mengeksplorasi pengalaman dan pandangan dari para informan.

Analisis Data menggunakan Sumber data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama, baik individu maupun kelompok, tanpa melalui perantara. Data primer ini dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan metode survei dan observasi. Metode survei dilakukan dengan mengajukan pertanyaan lisan dan tertulis, di mana penulis mewawancarai Kepala Bagian Legislasi untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

Selain itu, metode observasi diterapkan dengan mengamati langsung aktivitas yang terjadi di Sekretariat DPRD Kota Palembang untuk memperoleh data berdasarkan apa yang dilihat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah terdokumentasi dalam arsip. Penulis mengakses data sekunder ini dengan mengajukan permohonan izin untuk meminjam dokumen-dokumen terkait di Sekretariat DPRD Kota Palembang.

3. RESULT AND DISCUSSION

3.1 Analisis Proses Komunikasi Organisasi Bagian Legislasi Dalam Pengesahan Raperda Di Sekretariat DPRD Kota Palembang

Proses pembentukan Perda merupakan serangkaian tahapan yang melibatkan kolaborasi erat antara DPRD dan Sekretariat DPRD, dimulai dari pengajuan rancangan, pembahasan, hingga konsultasi publik dan pengesahan. Koordinasi yang efektif antara kedua entitas ini sangat penting, tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi proses, tetapi juga untuk memastikan hasil legislatif dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Komunikasi organisasi sangat berperan selama proses pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), khususnya di Sekretariat DPRD Kota Palembang. Proses ini melibatkan banyak interaksi antara berbagai aktor organisasi, termasuk bagian legislasi, pimpinan dan anggota DPRD, OPD, serta pihak eksternal terkait.

Oleh karena itu, keberhasilan pengesahan Raperda sangat dipengaruhi oleh seberapa efektif komunikasi dalam organisasi dapat berjalan dengan baik, terorganisir, dan terstruktur. Komunikasi di Sekretariat DPRD Palembang meliputi komunikasi vertikal antara atasan dan bawahan, komunikasi horizontal antar bagian, serta komunikasi diagonal yang melibatkan lintas unit dan bidang. Dalam hal ini, komunikasi dipandang sebagai mekanisme sistemik yang menghubungkan seluruh elemen organisasi legislatif untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pengesahan regulasi yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Komunikasi Vertikal

Komunikasi vertikal dalam suatu organisasi merujuk pada pertukaran informasi antara atasan dan bawahan dalam struktur organisasi. Komunikasi ini berjalan dua arah, yaitu dari atas ke bawah (downward communication) dan dari bawah ke atas (upward communication). Dalam konteks Sekretariat DPRD Kota Palembang, komunikasi vertikal sangat penting dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda). Ini mencakup penyampaian arahan dari pimpinan kepada bagian pelaksana, seperti bagian Legislasi atau staf teknis, serta pengiriman laporan dan hasil kerja dari bawahan kepada atasan. (Sari, A., Syaifullah, 2018). Sebagai contoh, Sekretaris DPRD memberikan instruksi kepada Kepala Bagian Legislasi untuk menyiapkan dokumen Raperda, atau staf pelaksana melaporkan perkembangan proses harmonisasi kepada pimpinan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pekerjaan yang telah dilakukan.

Komunikasi Horizontal

Komunikasi horizontal dalam sebuah organisasi adalah pertukaran informasi yang terjadi antara individu atau unit kerja dengan tingkatan jabatan yang setara dalam struktur organisasi. Di Sekretariat DPRD Kota Palembang, komunikasi horizontal terlihat dalam interaksi antara Bagian Legislasi dan Bagian Persidangan, atau antar staf yang berada di posisi yang setara. Komunikasi jenis ini sangat penting untuk mendukung proses penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda), karena dapat memperkuat koordinasi, mempercepat pelaksanaan tugas, dan mengurangi kemungkinan kesalahpahaman. Misalnya, ketika Bagian Legislasi membutuhkan informasi tentang jadwal rapat, mereka bisa langsung menghubungi Bagian Persidangan tanpa melalui prosedur birokrasi yang rumit. Begitu pula dalam pembahasan Raperda yang melibatkan berbagai sektor, komunikasi antara komisi-komisi DPRD sangat penting agar pembahasan berjalan dengan baik dan tidak tumpang tindih. (Damayanti & Sayyidatul, 2021)

Komunikasi horizontal sangat penting sebagai sarana interaksi antar bagian yang setara dalam organisasi, karena memungkinkan informasi disampaikan langsung antar unit yang memiliki posisi yang sama. Ketika komunikasi horizontal berjalan dengan baik, maka seluruh proses organisasi, mulai dari tahap masukan (input), pengkajian dan pembahasan (proses), hingga hasil akhirnya berupa peraturan daerah yang disahkan (output), dapat dilakukan dengan lebih efisien dan sejalan. Oleh karena itu, komunikasi horizontal tidak hanya mendukung kelancaran koordinasi, tetapi juga memperkuat kesatuan kerja dalam organisasi.

Komunikasi Diagonal

Komunikasi diagonal terjadi antara individu atau unit kerja yang memiliki tingkatan dan bagian yang berbeda dalam struktur organisasi. Komunikasi ini melibatkan lintas fungsi dan lintas jenjang, berbeda dengan komunikasi vertikal (atas-bawah) atau horizontal (sejajar) (Nuzulia, 1967). Sebagai contoh, ketika staf dari Bagian Legislasi bekerja langsung dengan anggota dewan atau tenaga ahli dari komisi tertentu, meskipun mereka berada di tingkatan atau bagian yang berbeda secara struktural, komunikasi diagonal terjadi saat membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) di DPRD Kota. Komunikasi ini penting untuk mempercepat koordinasi teknis, menghindari hambatan birokrasi, dan meningkatkan kerja sama lintas fungsi dalam pembahasan substansi Raperda.

Komunikasi diagonal berfungsi sebagai jalur penghubung yang memfasilitasi interaksi antar sub-sistem dalam organisasi yang memiliki perbedaan, baik dalam hal fungsi maupun jenjang struktural. Dalam organisasi yang kompleks seperti DPRD, pola komunikasi ini menjadi sangat penting. Contohnya, ketika staf teknis dari Bagian Legislasi berkomunikasi langsung dengan anggota legislatif dari komisi terkait, proses pertukaran informasi bisa berlangsung lebih cepat, pemahaman tentang aspek teknis dan substansi Raperda menjadi lebih jelas, serta potensi kesalahan komunikasi dapat diminimalkan.

Komunikasi Organisasi Berdasarkan Teori Sistem Umum

Teori Sistem Umum (*General System Theory*) yang dikembangkan oleh Ludwig von Bertalanffy melihat organisasi sebagai sistem terbuka yang terdiri atas elemen-elemen saling berkaitan. Dalam konteks Bagian Legislasi Sekretariat DPRD Kota Palembang, sistem ini melibatkan subsistem seperti Subbagian Perundang-undangan, staf legislatif, Sekretaris DPRD, hingga anggota legislatif itu sendiri.

Komunikasi di antara elemen ini sangat penting karena menjadi media penghubung antar subsistem. Berdasarkan hasil wawancara:

> *"Kami di Bagian Legislasi harus menyampaikan draft Raperda ke berbagai pihak, mulai dari pimpinan alat kelengkapan dewan hingga sekretariat lainnya. Kalau jalur komunikasi tidak lancar, proses bisa terhambat."*(Informan 1, Kepala Bagian Legislasi)

Kondisi ini menunjukkan bahwa organisasi memerlukan sistem komunikasi yang adaptif dan terkoordinasi, karena proses pengesahan Raperda melibatkan banyak aktor, yang saling bergantung dalam satu sistem kerja.

3.2 Hambatan-hambatan Komunikasi Pada Saat Rapat Peraturan Daerah di Sekretariat DPRD Kota Palembang

Komunikasi organisasi sangat penting dalam proses pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Sekretariat DPRD Kota Palembang. Hal ini karena komunikasi diperlukan untuk memfasilitasi pemahaman antara bagian legislasi, bagian rapat dan risalah, serta anggota dewan dalam satu forum resmi. Namun, berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, ditemukan beberapa masalah komunikasi yang menghambat proses pengesahan perda, seperti kurangnya koordinasi antarbagian, keterlambatan dalam penyebaran dokumen rapat, dan perbedaan pendapat mengenai substansi Raperda (Ardita Siwantari, 2023). Berikut adalah hambatan-hambatan tersebut beserta solusi yang diusulkan.

Hasil observasi dan wawancara mengungkap beberapa hambatan utama:

Lambatnya alur distribusi dokumen Raperda secara manual menyebabkan keterlambatan pada tahap pembahasan.Kurangnya pemanfaatan teknologi komunikasi internal, seperti email resmi atau sistem manajemen dokumen digital.Ketidakhadiran koordinasi rutin lintas bagian, sehingga informasi penting seringkali tidak tersampaikan secara utuh.

Hambatan Oraganisasional

Hambatan organisasional adalah bentuk gangguan komunikasi yang muncul karena faktor-faktor internal organisasi, seperti struktur organisasi, sistem kerja, budaya kerja, maupun mekanisme operasional. Hambatan ini dapat mengganggu proses pertukaran informasi antara bagian, divisi, maupun individu dalam organisasi, sehingga pesan yang disampaikan tidak diterima dengan baik oleh pihak yang dituju (Wicaksana et al., 2023).

Kurangnya koordinasi antar bagian dalam rapat pembahasan Raperda di Sekretariat DPRD Kota Palembang menjadi contoh nyata dari hambatan organisasional dalam komunikasi organisasi. Hambatan ini muncul ketika struktur organisasi dan prosedur kerja yang ada belum mampu menciptakan aliran komunikasi yang efektif dan terkoordinasi antar unit kerja terkait. Seharusnya, Bagian Legislasi, Bagian Persidangan, dan Bagian Hukum memiliki pola komunikasi yang terarah dan sistematis.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa koordinasi antar bagian ini masih kurang optimal. Akibatnya, informasi tidak tersampaikan secara utuh, terjadi perbedaan pemahaman terhadap isi Raperda, dan jalannya rapat pembahasan menjadi terganggu. Dampak dari hambatan ini sangat terasa, karena tidak hanya memperlambat proses legislasi, tetapi juga bisa menurunkan kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan. Hal ini juga berpengaruh pada kemampuan DPRD dalam mengambil keputusan secara tepat waktu, serta menurunkan efektivitas kinerja organisasi secara keseluruhan.

Sebagai contoh, jika komunikasi antara Bagian Legislasi dan Bagian Hukum tidak berjalan dengan baik, dapat terjadi ketidaksesuaian dalam memahami aspek hukum dari Raperda yang sedang dibahas, sehingga memperlambat proses harmonisasi regulasi. Oleh sebab itu, dibutuhkan langkah-langkah untuk memperbaiki koordinasi antar bagian dengan menggunakan pendekatan yang lebih terstruktur dan sistematis.

Hambatan Semantik

Hambatan semantik terjadi ketika orang memahami kata atau pesan dengan cara yang berbeda. Hambatan ini bisa muncul saat anggota dewan atau pihak terkait tidak sepakat mengenai isi atau rincian teknis Raperda yang sedang dibahas di Sekretariat DPRD Kota Palembang. Misalnya, penggunaan kata atau istilah dalam Raperda mungkin kurang jelas atau memiliki arti yang berbeda-beda bagi masing-masing orang. Akibatnya, satu konsep yang sama dapat ditafsirkan berbeda oleh tiap individu (Fitri et al., 2023).

Sering kali, perbedaan pemahaman ini menimbulkan ketegangan dalam rapat dan menghambat proses pengambilan keputusan. Jika masing-masing orang memiliki tafsiran yang berbeda terhadap suatu bagian dalam Raperda, maka untuk mencapai kesepakatan menjadi jauh lebih sulit. Kondisi ini bisa menyebabkan rapat harus ditunda atau pembahasan perlu diulang kembali.

Untuk mengatasi masalah perbedaan pendapat dalam rapat pembahasan Raperda, salah satu cara yang bisa digunakan adalah menerapkan metode diskusi yang lebih teratur. Misalnya, melibatkan moderator dari luar yang bersifat netral serta menetapkan batas waktu untuk setiap peserta agar penyampaian pendapat lebih tertib dan efisien. Selain itu, penting juga untuk menyamakan pemahaman mengenai tujuan utama dari pembahasan dan memastikan arah diskusi tetap fokus pada inti masalah yang didukung oleh data yang objektif.

Menurut prinsip dalam Teori Sistem Umum, ketidaksepakatan yang terjadi menunjukkan adanya gangguan atau ketidakseimbangan dalam sistem organisasi. Maka dari itu, dibutuhkan strategi seperti pengelolaan diskusi yang lebih rapi dan terstruktur agar aliran informasi tetap lancar serta semua pihak bisa menyampaikan pendapatnya secara efektif tanpa menghambat kinerja organisasi secara keseluruhan.

Hambatan Mekanis

Keterlambatan penyampaian informasi oleh Bagian Legislasi dalam rapat pembahasan Raperda di Sekretariat DPRD Kota Palembang dapat disebut sebagai hambatan mekanis dalam komunikasi organisasi. Hambatan mekanis terjadi ketika ada gangguan pada saluran atau alat komunikasi, sehingga informasi tidak sampai tepat waktu. Dalam kasus ini, keterlambatan penyampaian informasi sangat mengganggu kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi. (Diah Suci, n.d.)

Bagian Legislasi memegang peran penting dalam menyiapkan materi dan rincian teknis terkait Raperda. Oleh karena itu, ketepatan waktu dalam penyampaian informasi sangat diperlukan agar komisi maupun anggota dewan dapat memahami materi dengan baik sebelum rapat dimulai. Ketika dokumen atau

informasi diterima terlambat, anggota dewan tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari materi, sehingga memperlambat proses diskusi dan pengambilan keputusan.

Keterlambatan dalam mendistribusikan dokumen, bahan presentasi, atau hasil harmonisasi dapat menyebabkan tertundanya jadwal rapat, kurangnya pemahaman peserta terhadap materi, dan bahkan munculnya miskomunikasi antar bagian. Permasalahan ini menggambarkan ketidakseimbangan aliran komunikasi dalam organisasi, yang menurut Teori Sistem Umum, dapat melemahkan fungsi koordinatif dan integratif antar sub-sistem. Dalam konsep sistem terbuka, setiap unit kerja harus bisa beroperasi selaras dengan kebutuhan informasi yang ada.

Apabila Bagian Legislasi tidak mampu memenuhi kebutuhan informasi secara tepat waktu, maka kinerja keseluruhan sistem organisasi, terutama dalam proses legislasi daerah, akan mengalami penurunan efektivitas. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya perbaikan melalui optimalisasi sistem manajemen informasi dan peningkatan disiplin dalam koordinasi antar bagian.

"Kadang kalau dokumen hanya dikirim fisik, bisa tertumpuk. Apalagi kalau belum ada sistem pengecekan siapa yang sudah atau belum membaca."— (Informan 2, Staf Subbagian Perundang-undangan)

3.3 Solusi yang Lebih Spesifik dan Operasional

Untuk mengatasi hambatan di atas, perlu solusi yang tidak hanya konseptual, tetapi juga terukur dan implementatif:

Penggunaan Platform Digital Terintegrasi

1. Menerapkan aplikasi manajemen dokumen legislatif internal, seperti *document tracking system* berbasis web, untuk memantau alur dokumen Raperda secara real-time.
2. Integrasi dengan email resmi dan notifikasi otomatis ke semua pihak terkait ketika ada perubahan atau update dokumen.

Rapat Koordinasi Berkala

1. Menjadwalkan rapat koordinasi internal antar-subbagian setiap awal dan akhir minggu untuk menyinkronkan perkembangan pembahasan Raperda.
2. Rapat dapat dilakukan secara daring melalui platform Zoom/Google Meet jika waktu fisik terbatas. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Teknologi Informasi
3. Melakukan pelatihan internal terkait penggunaan platform digital dan tata cara komunikasi formal di lingkungan kerja.
4. Pelatihan ini bisa bekerja sama dengan Dinas Kominfo atau pihak ketiga.

"Kalau ada sistem yang bisa memantau dokumen Raperda sampai mana saja, itu sangat membantu. Selama ini kita masih manual." (Informan 3, Staf Administrasi Legislasi)

Dalam kerangka Teori Sistem Umum, setiap unit dalam organisasi harus bekerja sebagai bagian dari keseluruhan sistem yang saling memengaruhi. Hambatan dalam satu bagian, seperti keterlambatan distribusi dokumen, dapat menyebabkan stagnasi pada keseluruhan proses legislasi.

Dari kasus ini, dapat dilihat bahwa Sekretariat DPRD Kota Palembang memerlukan:

1. Koordinasi antar-subsistem yang lebih kuat (interdependensi).
2. Umpan balik (feedback) yang cepat dan akurat antar bagian.
3. Adaptasi sistem terhadap perubahan eksternal, seperti tuntutan digitalisasi dan transparansi publik

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan mengenai komunikasi organisasi Bagian Legislasi dalam pengesahan Raperda di Sekretariat DPRD Kota Palembang, serta dengan berpedoman pada Teori Sistem Umum (General System Theory) yang dikembangkan oleh Ludwig von Bertalanffy, dapat disimpulkan bahwa:

1. Komunikasi di dalam Bagian Legislasi memiliki peran yang sangat penting dalam memperlancar proses pengesahan Raperda di Sekretariat DPRD Kota Palembang. Komunikasi yang berlangsung antara atasan dan bawahan (vertikal), antarbagian yang sejajar (horizontal), serta antarbagian dengan tugas dan tingkatan berbeda (diagonal), membentuk kerja sama yang harmonis dan saling mendukung. Komunikasi vertikal membantu dalam penyampaian perintah dan laporan, komunikasi horizontal memperkuat kerja sama antarbagiannya, sedangkan komunikasi diagonal mempercepat koordinasi sehingga pembahasan Raperda dapat diselesaikan dengan lebih cepat.
   Selain itu, penggunaan bahasa yang jelas dan sikap yang santun turut memperlancar proses diskusi, memperkuat saling pengertian, dan mendukung pengambilan keputusan, baik dalam forum resmi maupun dalam kegiatan sehari-hari. Semua bagian yang terlibat saling mendukung dan bergantung satu sama lain agar keputusan yang dihasilkan tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Proses komunikasi dalam rapat pembahasan Raperda di Sekretariat DPRD Kota Palembang menghadapi beberapa hambatan, yaitu hambatan organisasional, hambatan semantik, dan hambatan mekanis, yang mengganggu kelancaran proses legislasi. Hambatan organisasional muncul karena kurangnya koordinasi antarbagian, hambatan semantik disebabkan perbedaan pemahaman terhadap istilah yang digunakan dalam Raperda, sedangkan hambatan mekanis terjadi akibat keterlambatan distribusi dokumen. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, perlu dilakukan perbaikan koordinasi antarbagian melalui penyusunan SOP yang jelas, pemanfaatan teknologi informasi, serta pembagian tugas yang lebih terstruktur antara anggota DPRD, Bagian Legislasi, dan OPD. Dengan sistem komunikasi yang lebih teratur dan efektif, diharapkan proses legislasi dapat berjalan lebih lancar dan menghasilkan peraturan daerah yang lebih berkualitas

ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam penerbitan artikel ini.

REFERENCES

[1] Afandi, A., Negeri, U. I., Haji, K., Siddiq, A., & Syariah, F. (2024). Peran sekretariat dprd dalam meningkatkan kualitas legislasi terhadap perda yang baik di kabupaten jember skripsi.
[2] Aprianto, Y., Kumorotomo, W., Keterdedahan, R., Bencana, I., Kesiapsiagaan, D., Menghadapi, M., Banjir, B., Di Kabupaten, R., Barat, A., Islami, F., Fahrimal, Y., Husna, A., Maulina, P., Anshari, I. N., Anshari, F., Jaringan, A., Publik, O., Sosial, P., Besar, B., … Jmki, V. (2023). Komunikasi Kepemimpinan dalam Perubahan Organisasi Pemerintah Fantasy Premier League: Game dan Pergeseran Budaya Fans Sepakbola di Era Digital. 4, 1–22.
[3] Ardita siwantari. (2023). Strategi komunikasi dprd kota makassar dalam menyosialisasikan rencana ranperda inisiatif.
[4] Damayanti, D., & Sayyidatul, U. (2021). Jenis Jenis Komunikasi. In Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies (Vol. 2, Issue 3).
[5] Diah suci. (n.d.). Hambatan_Komunikasi_dan_Strategi_mengata.
[6] Evi Zahara. (2020). Peranan Komunikasi Organisasi Pimpinan Organisasi. Peranan Komunikasi Organisasi Bagi Pimpinan Organisasi.
[7] Edyana, A. (2022). Kerangka Teori, Kerangka Konsep, Hipotesis, Dan Definisi Operasional. Domain Afektif Depkes RI Cartono Dan Utari & Sundeen, 2019, 1–12. http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/126446-TESIS0494 Ase N08f- Faktor yang-Metodologi.pdf
[8] Faiz, A. (2024). OPTIMALISASI KINERJA SEKRETARIAT DPRD PADA SUB BAGIAN RAPAT DAN RISALAH DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DPRD KOTA SURABAYA.
[9] Fitri, N. L., Adha, C., & Nasution, S. F. (2023). Pentingnya Penerapan Komunikasi Efektif Dalam

Konteks Pendidikan. Journal Of Social Science Research Volume, 3(6), 5241–5251.
[10] Nuzulia, A. (2021). Komunikasi Diagonal Yang Menciptakan Profesionalitas Antar Manajer Dan Staf. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 5–24.
[11] Rusadi, U. (2023). Kajian media: Isu ideologis dalam perspektif, teori dan metode. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
[12] Sari, A. , Syaifullah, J. (2020). Komunikasi Organisasi.
[13] Supriadi, Y. (2023). Komunikasi Politik DPRD Dalam Meningkatkan Peran Legislasi di Kota Bandung. Mediator: Jurnal Komunikasi, 10(1), 25–36. https://doi.org/10.29313/mediator.v10i1.2119
[14] Syafitri, V. P., & Toni, A. (2024). Komunikasi Organisasi dalam Proses Pembentukan Budaya Organisasi Melalui Agent Of Change. Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi, 5(2), 1602–1610. https://doi.org/10.35870/jimik.v5i2.721
[15] Wicaksana, A. H., Rakhmad, W. N., & Lestari, S. B. (2023). Hambatan Komunikasi dalam Organisasi Ikatan Mahasiswa Berprestasi Wonogiri. Interaksi Online, 11(4), 73–83.